



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pengelolaan keuangan daerah perlu diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sehingga menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri dari :
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2023 Berjumlah Rp2.056.716.754.788,00 (dua triliun lima puluh enam miliar tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp	1.949.171.518.670,00
b. Belanja Daerah	Rp	2.037.485.985.557,00
Defisit/Surplus	Rp	(88.314.466.887)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp	107.545.236.118,00
2. Pengeluaran	Rp	19.230.769.231,00
Pembiayaan Neto	Rp	88.314.466.887,00
Sisa Lebih Pembiayaan		
Anggaran	Tahun	
Berkenaan	Rp	0,00



Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.949.171.518.670,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), yang bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.405.058.600,00 (lima ratus miliar empat ratus lima juta lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah),
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.447.766.460.070,00 (satu triliun empat ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu tujuh puluh rupiah),
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.037.485.985.557,00 (dua triliun tiga puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja operasional;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
- (2) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.540.205.892.070,00 (satu triliun lima ratus empat puluh miliar dua ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh rupiah),

6

- (3) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp249.730.171.271,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah),
- (4) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.663.210.163,00 (empat miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu seratus enam puluh tiga rupiah),
- (5) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp242.886.712.053,00 (dua ratus empat puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu lima puluh tiga rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp88.314.466.887,00 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus empat belas juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp107.545.236.118,00 (seratus tujuh miliar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah),
- (3) Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.230.769.231,00 (sembilan belas miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 6

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(88.314.466.887) (minus



delapan puluh delapan miliar tiga ratus empat belas juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih Penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp88.314.466.887,00 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus empat belas juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

6

- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 8

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Kegiatan, Kelompok, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Pemerintahan Daerah, Kegiatan Beserta Hasil Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM.

Bahwa pengelolaan keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan Daerah perlu diwujudkan dalam APBD sehingga menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD. APBD merupakan kejelasan terhadap target-target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada tahun anggaran 2023.

Berdasarkan hal yang telah disebutkan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

6

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 11



12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 22 Desember 2022
BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 22 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 11 NOREG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI: (11,106/2022)

KABUPATEN TABANAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500.405.058.600
4.1.01	Pajak Daerah	168.400.658.770
4.1.02	Retribusi Daerah	23.053.041.755
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.198.935.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	298.752.423.075
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.447.766.460.070
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.127.062.078.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	320.704.382.070
4.3	LAJN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.000.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.000.000.000
	Jumlah Pendapatan	1.949.171.518.670
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.540.205.892.070
5.1.01	Belanja Pegawai	852.201.045.013
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	597.548.311.006
5.1.03	Belanja Bunga	7.191.907.051
5.1.05	Belanja Hibah	83.264.629.000
5.2	BELANJA MODAL	249.730.171.271
5.2.01	Belanja Modal Tanah	100.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.761.208.857
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.473.703.450
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	121.329.228.750
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.061.646.314
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.383.900
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.663.210.163
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.663.210.163
5.4	BELANJA TRANSFER	242.886.712.053
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	19.145.370.053
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	223.741.342.000
	Jumlah Belanja	2.037.485.985.557
	Total Surplus/(Defisit)	(88.314.466.887)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	107.545.236.118
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	107.545.236.118

KABUPATEN TABANAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	107.545.236.118
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.230.769.231
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	19.230.769.231
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	19.230.769.231
	Pembiayaan Netto	88.314.466.887
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkelaan	0

Bupati Tabanan


I KOMANG GEDE SANJAYA

KABUPATEN TABANAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0	4.900.872.200	24.964.000	0	0	4.925.836.200	
2 09	2.09.00.00.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	4.900.872.200	24.964.000	0	0	4.925.836.200
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0	100.000.000	100.000.000	0	0	200.000.000	
2 10	1.03.1.04.2.10.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	0	100.000.000	100.000.000	0	0	200.000.000
2 10	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	0	0	0	0
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	900.000.000	25.454.481.550	7.141.989.800	0	0	32.596.471.350	
2 11	2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	900.000.000	25.454.481.550	7.141.989.800	0	0	32.596.471.350
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	8.997.230.797	426.844.900	0	0	9.424.075.697	
2 12	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	8.997.230.797	426.844.900	0	0	9.424.075.697
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	11.292.538.600	50.002.800	0	0	11.342.541.400	
2 13	2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	11.292.538.600	50.002.800	0	0	11.342.541.400
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	9.809.024.300	25.284.600	0	0	9.834.308.900	
2 14	2.14.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	9.809.024.300	25.284.600	0	0	9.834.308.900
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	9.216.616.563	31.683.883.750	1.743.799.490	0	0	33.427.683.240	
2 15	2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	9.216.616.563	31.683.883.750	1.743.799.490	0	0	33.427.683.240
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN	900.000.000	14.982.416.250	1.143.822.800	0	0	16.126.239.050	

KABUPATEN TABANAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	141.963.796.600	157.733.360.400	0	0	299.697.157.000
1 03 1.03.1.04.2.10.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	0	141.963.796.600	157.733.360.400	0	0	299.697.157.000
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	1.781.000.000	0	0	0	1.781.000.000
1 04 1.03.1.04.2.10.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	0	1.781.000.000	0	0	0	1.781.000.000
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0	23.019.954.996	194.063.900	0	0	23.214.018.896
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	19.371.436.420	169.124.100	0	0	19.540.560.520
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	3.648.518.576	24.939.800	0	0	3.673.458.376
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0	11.394.722.250	159.236.600	0	0	11.553.958.850
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	11.394.722.250	159.236.600	0	0	11.553.958.850
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	16.311.185.563	165.481.476.984	12.563.040.040	0	0	178.044.517.024
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0	489.458.300	1.741.700	0	0	491.200.000
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA	0	0	0	0	0	0
2 07 2.17.2.07.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	0	489.458.300	1.741.700	0	0	491.200.000
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	729.474.900	0	0	0	729.474.900
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN	0	729.474.900	0	0	0	729.474.900

KABUPATEN TABANAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5 05 5.01.00.00.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	0	0	0	0	0
5 05 5.05.00.00.00.01.0000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	0	6.147.624.274	24.994.500	0	0	6.172.618.774
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	15.309.480.683	0	0	0	15.309.480.683
6 01	INSPEKTORAT DAERAH	0	15.309.480.683	0	0	0	15.309.480.683
6 01 6.01.00.00.00.01.0000	INSPEKTORAT	0	15.309.480.683	0	0	0	15.309.480.683
7	UNSUR KEWILAYAHAN	0	36.081.843.295	522.786.700	0	0	36.604.629.995
7 01	KECAMATAN	0	36.081.843.295	522.786.700	0	0	36.604.629.995
7 01 7.01.00.00.00.01.0000	KECAMATAN KEDIRI	0	3.918.293.000	29.887.200	0	0	3.948.180.200
7 01 7.01.00.00.00.02.0000	KECAMATAN TABANAN	0	3.458.128.095	29.781.700	0	0	3.487.909.795
7 01 7.01.00.00.00.03.0000	KECAMATAN MARGA	0	3.906.536.300	29.012.600	0	0	3.935.548.900
7 01 7.01.00.00.00.04.0000	KECAMATAN BATURITI	0	3.540.839.350	29.726.200	0	0	3.570.565.550
7 01 7.01.00.00.00.05.0000	KECAMATAN PENEBEL	0	4.318.525.400	99.547.000	0	0	4.418.072.400
7 01 7.01.00.00.00.06.0000	KECAMATAN KERAMBITAN	0	3.327.407.200	179.671.800	0	0	3.507.079.000
7 01 7.01.00.00.00.07.0000	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR	0	3.181.844.000	29.867.900	0	0	3.211.711.900
7 01 7.01.00.00.00.08.0000	KECAMATAN SELEMADEG	0	3.590.950.850	29.922.900	0	0	3.620.873.750
7 01 7.01.00.00.00.09.0000	KECAMATAN SELEMADEG BARAT	0	3.319.773.200	35.512.600	0	0	3.355.285.800
7 01 7.01.00.00.00.10.0000	KECAMATAN PUPUAN	0	3.519.545.900	29.856.800	0	0	3.549.402.700
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	9.339.786.650	52.538.500	0	0	9.392.325.150
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	9.339.786.650	52.538.500	0	0	9.392.325.150
8 01 8.01.00.00.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	9.339.786.650	52.538.500	0	0	9.392.325.150
TOTAL		1.949.161.647.670	1.540.205.892.070	249.730.171.271	4.663.210.163	242.886.712.053	2.037.485.985.557

Bupati Tabanan

I KOMANG GEDE SANJAYA

KABUPATEN TABANAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
8 01	8.01.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	2.000.000	
8 01	8.01.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	
8 01	8.01.00.0.00.01.0000	01	2.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.859.343.000	
8 01	8.01.00.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.856.843.000	
8 01	8.01.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.856.843.000	
8 01	8.01.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	3.856.843.000	
8 01	8.01.00.0.00.01.0000	01	2.02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	2.500.000	
8 01	8.01.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	2.500.000	
8 01	8.01.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	
8 01	8.01.00.0.00.01.0000	01	2.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.127.500	
8 01	8.01.00.0.00.01.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.017.150	
8 01	8.01.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	3.017.150	
8 01	8.01.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.017.150	
8 01	8.01.00.0.00.01.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.633.900	

KABUPATEN TABANAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
							Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
8	01	8.01.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	BELANJA OPERASI	25.000.000	
8	01	8.01.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	
8	01	8.01.00.0.00.01.0000	04	2.01	04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	125.000.000	
8	01	8.01.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5	BELANJA OPERASI	125.000.000	
8	01	8.01.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000	
8	01	8.01.00.0.00.01.0000	05	0.00	00		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	330.000.000	
8	01	8.01.00.0.00.01.0000	05	2.01	00		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pernantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	330.000.000	
8	01	8.01.00.0.00.01.0000	05	2.01	04		Pelaksanaan Koordinasi di	330.000.000	

KABUPATEN TABANAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
										Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
8.01	8.01.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1				BELANJA OPERASI	300.000.000	
8.01	8.01.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	
8.01	8.01.00.0.00.01.0000	02	2.01	04						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	70.000.000	
8.01	8.01.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1				BELANJA OPERASI	70.000.000	
8.01	8.01.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	
8.01	8.01.00.0.00.01.0000	03	0.00	00						PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	3.043.473.000	
8.01	8.01.00.0.00.01.0000	03	2.01	00						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika	3.043.473.000	

KABUPATEN TABANAN

**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
 PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Organisasi : 8.01.00.00.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
8 01	8.01.00.00.00.01.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	44.773.850	.
8 01	8.01.00.00.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	44.773.850	
8 01	8.01.00.00.00.01.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	
8 01	8.01.00.00.00.01.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	10.000.000	
8 01	8.01.00.00.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	
Jumlah Belanja								9.392.325.150		
Total Surplus/(Defisit)								(9.392.325.150)		
0 00	8.01.00.00.00.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0		

Bupati Tabanan

I KOMANG GEDE SANJAYA

KABUPATEN TABANAN
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.029.456.031.328	225.879.753.136	0	0	1.255.335.784.464
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	442.077.514.889	33.864.496.666	0	0	475.942.011.555
1.01.1	1.01.2.19.00.01.0000		DINAS PENDIDIKAN	442.077.514.889	33.864.496.666	0	0	475.942.011.555
1.01.1.01	1.01.2.19.00.01.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	367.228.276.755	224.971.800	0	0	367.453.248.555
1.01.1.01.01	1.01.2.19.00.01.0000	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	0	0	0	5.000.000
1.01.1.01.01.01	1.01.2.19.00.01.0000	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	0	0	0	3.000.000
1.01.1.01.01.07	1.01.2.19.00.01.0000	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	0	0	0	2.000.000
1.01.1.01.02	1.01.2.19.00.01.0000	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	364.016.904.255	0	0	0	364.016.904.255
1.01.1.01.02.01	1.01.2.19.00.01.0000	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	364.014.404.255	0	0	0	364.014.404.255
1.01.1.01.02.07	1.01.2.19.00.01.0000	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	2.500.000	0	0	0	2.500.000
1.01.1.01.02.06	1.01.2.19.00.01.0000	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	175.364.800	0	0	0	175.364.800
1.01.1.01.02.06.01	1.01.2.19.00.01.0000	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	0	0	0	5.000.000
1.01.1.01.02.06.03	1.01.2.19.00.01.0000	01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.000	0	0	0	7.500.000
1.01.1.01.02.06.04	1.01.2.19.00.01.0000	01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.518.800	0	0	0	102.518.800
1.01.1.01.02.06.05	1.01.2.19.00.01.0000	01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	0	0	0	20.000.000
1.01.1.01.02.06.06	1.01.2.19.00.01.0000	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	5.460.000	0	0	0	5.460.000
1.01.1.01.02.06.07	1.01.2.19.00.01.0000	01	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000	0	0	0	25.000.000
1.01.1.01.02.06.09	1.01.2.19.00.01.0000	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.886.000	0	0	0	9.886.000
1.01.1.01.02.07	1.01.2.19.00.01.0000	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	24.971.800	0	0	24.971.800
1.01.1.01.02.07.06	1.01.2.19.00.01.0000	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	24.971.800	0	0	24.971.800
1.01.1.01.02.08	1.01.2.19.00.01.0000	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.916.871.200	0	0	0	2.916.871.200
1.01.1.01.02.08.01	1.01.2.19.00.01.0000	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	0	0	0	5.000.000
1.01.1.01.02.08.02	1.01.2.19.00.01.0000	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000	0	0	0	180.000.000
1.01.1.01.02.08.04	1.01.2.19.00.01.0000	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.731.871.200	0	0	0	2.731.871.200
1.01.1.01.02.09	1.01.2.19.00.01.0000	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.136.500	200.000.000	0	0	314.136.500
1.01.1.01.02.09.01	1.01.2.19.00.01.0000	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	114.136.500	0	0	0	114.136.500

KABUPATEN TABANAN
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA
KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
	Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
8 01 8.01.00.00.01.0000 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000
TOTAL		1.540.205.892.070	249.730.171.271	4.663.210.163	242.886.712.053	2.037.485.985.557

Bupati Tabanan



KOMANG GEDE SANJAYA



KABUPATEN TABANAN
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode		Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
01		PELAYANAN UMUM					
01	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	367.228.276.755	224.971.800	0	0	367.453.248.555
01	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	321.537.128.293	14.074.824.195	0	0	335.611.952.488
01	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17.548.137.900	99.854.700	0	0	17.647.992.600
01	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	21.415.740.656	176.880.400	0	0	21.592.621.056
01	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6.341.722.450	159.236.600	0	0	6.500.959.050
01	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0	0	0	0	0
01	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4.428.372.300	24.964.000	0	0	4.453.336.300
01	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	14.898.047.750	159.121.200	0	0	15.057.168.950
01	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	8.997.230.797	426.844.900	0	0	9.424.075.697

KABUPATEN TABANAN
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
	BIDANG KEBUDAYAAN					
10 04 2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	71.137.600	36.461.300	0	0	107.598.900
11	PERLINDUNGAN SOSIAL					
11 01 1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4.852.999.800	0	0	0	4.852.999.800
11 02 2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	729.474.900	0	0	0	729.474.900
TOTAL		1.540.205.892.070	249.730.171.271	4.663.210.163	242.886.712.053	2.037.485.985.557

Bupati Tabanan



I KOMANG GEDE SANJAYA

KABUPATEN TABANAN
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
A SPM Bidang Pendidikan				
Pendidikan Dasar				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		4.923.502.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		180.000.000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		50.000.000
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		1.125.000.000
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		7.894.890.400
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				14.173.392.400
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		658.108.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		170.738.000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		50.000.000
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		8.150.879.000
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				9.029.725.000
Jumlah Pendidikan Dasar				23.203.117.400
Pendidikan Kesetaraan				
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		170.000.000
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		30.000.000
Jumlah Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				200.000.000
Jumlah Pendidikan Kesetaraan				200.000.000
Pendidikan Anak Usia Dini				
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		100.000.000

KABUPATEN TABANAN
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
		Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		393.814.420
		Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		393.814.420
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		50.000.000
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		111.999.500
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		159.999.600
		Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		321.999.100
		Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		321.999.100
		Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum		1.275.443.840
F SPM Bidang Sosial				
		Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti		
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
		Penyediaan Permakanan		224.999.800
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		50.000.000
		Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		274.999.800
		Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti		274.999.800
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial				
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		
		Penyediaan Makanan		200.000.000
		Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		200.000.000
		Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial		200.000.000
		Jumlah SPM Bidang Sosial		474.999.800

Bupati Tabanan



I KOMANG GEDE SANJAYA

KABUPATEN TABANAN
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode		Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.119.504.810.074	1.255.335.784.464
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	501.563.234.072	475.942.011.555
1	01	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	395.620.614.393	367.453.248.555
1	01	02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	105.469.282.872	108.148.763.000
1	01	03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	250.000.000	140.000.000
1	01	04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	223.336.807	200.000.000
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	457.127.887.038	443.147.638.163
1	02	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	305.557.182.939	335.611.952.488
1	02	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	144.695.978.949	103.643.599.775
1	02	03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.558.594.030	1.581.655.800
1	02	04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	171.875.520	392.766.000
1	02	05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	144.255.600	1.917.664.100
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	128.499.554.964	299.697.157.000
1	03	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.605.273.008	17.647.992.600
1	03	02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	10.307.562.590	3.808.468.400
1	03	03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.840.869.364	2.955.000.000
1	03	05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.508.220.000	50.000.000
1	03	06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.052.000.000	1.700.000.000
1	03	07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	782.670.659	12.612.000.000
1	03	08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.215.490.982	38.804.400.000
1	03	09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	17.533.953.268	50.120.900.000
1	03	10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	65.560.825.093	170.846.826.000

KABUPATEN TABANAN
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	229.506.145	1.337.324.200
7			UNSUR KEWILAYAHAN	35.952.040.536	36.604.629.995
7	01		KECAMATAN	35.952.040.536	36.604.629.995
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.220.300.536	36.194.655.395
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	119.586.000	181.984.300
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	482.878.000	134.990.300
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	7.415.158.166	9.392.325.150
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.415.158.166	9.392.325.150
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.074.263.166	4.293.852.150
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	360.000.000	465.000.000
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEVMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.741.750.000	3.043.473.000
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0	150.000.000
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	0	330.000.000
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.239.145.000	1.110.000.000

Bupati Tabanan



I KOMANG GEDE SANJAYA

KABUPATEN TABANAN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000					DINAS PENDIDIKAN	535.191.507.500	474.505.566.555	482.636.611.555
1.01.2.19.0.00.01.0000	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	523.490.269.500	467.810.966.555	475.942.011.555
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	523.490.269.500	467.810.966.555	475.942.011.555
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	424.369.139.300	377.109.591.555	367.453.248.555
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	2.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	420.714.139.300	373.902.247.255	364.016.904.255
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	420.709.139.300	373.899.747.255	364.014.404.255
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	5.000.000	2.500.000	2.500.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	0	0	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	265.000.000	117.386.000	175.364.800
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	5.000.000	5.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	7.500.000	7.500.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.000.000	45.000.000	102.518.800
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000	20.000.000	20.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	5.000.000	5.460.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000	25.000.000	25.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	Penyeleenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	9.886.000	9.886.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000	24.971.800	24.971.800
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	24.971.800	24.971.800

KABUPATEN TABANAN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
					Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	0	0
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.400.000.000	500.000.000	1.000.000.000

Bupati Tabanan



KOMANG GEDE SANJAYA

KABUPATEN TABANAN
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah				
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer					
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%			
1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan												
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA												
			DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	409.200.000	0	0	0	409.200.000	100			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
			DINAS KETAHANAN PANGAN	1.200.000	0	0	0	1.200.000	100			
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT												
			DINAS KETAHANAN PANGAN	10.000.000	0	0	0	10.000.000	100			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	997.000	0	0	0	997.000	100			
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK												
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19.999.500	0	0	0	19.999.500	100			
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA												
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	299.999.750	0	0	0	299.999.750	100			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
			DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	2.000.000	0	0	0	2.000.000	100			
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	855.000	0	0	0	855.000	100			
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL												
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	25.000.000	0	0	0	25.000.000	100			

KABUPATEN TABANAN
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
			KECAMATAN PUPUAN	15.000.000	0	0	0	15.000.000	100
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.000.000	0	0	0	2.000.000	100
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						
			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	70.000.000	0	0	0	70.000.000	100

Bupati Tabanan

I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
 NOMOR : 11 TAHUN 2022
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI
PER - GOLONGAN DAN PERJABATAN
TAHUN 2023

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	1	-	-	-	13	-	14
Golongan IV/c	-	30	-	-	-	50	-	80
Golongan IV/b	-	3	44	-	-	1.362	1	1.410
Golongan IV/a	-	-	75	41	-	482	15	613
JUMLAH GOLONGAN IV	-	34	119	41	-	1.907	16	2.117
Golongan III/d	-	-	24	281	-	625	118	1.048
Golongan III/c	-	-	9	117	-	367	262	755
Golongan III/b	-	-	-	11	-	298	385	694
Golongan III/a	-	-	-	1	-	245	465	711
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	33	410	-	1.535	1.230	3.208
Golongan II/d	-	-	-	-	-	77	442	519
Golongan II/c	-	-	-	-	-	102	234	336
Golongan II/b	-	-	-	-	-	7	136	143
Golongan II/a	-	-	-	-	-	3	67	70
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	-	189	879	1.068
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	13	13
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	41	41
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	-	54	54
TOTAL	-	34	152	451	-	3.631	2.179	6.447

BUPATI TABANAN,


IKOMANG GEDE SANJAYA

**LAMPIRAN XI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 11 TAHUN 2022

TANGGAL : 22 DESEMBER 2022

**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN PIUTANG	JUMLAH PIUTANG SAMPAI DENGAN TAHUN 2021	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2022	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2022	PERKIRAAN SALDO AKHIR TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Piutang Pajak Hotel		656.601.021,71	-	-	656.601.021,71
2	Piutang Pajak Restoran		2.517.530.718,78	-	-	2.517.530.718,78
3	Piutang Pajak Hiburan		729.296.019,00	-	-	729.296.019,00
4	Piutang Pajak Air Bawah Tanah		46.185.500,00	-	-	46.185.500,00
	Piutang Pajak Parkir		170.000,00	-	-	170.000,00
5	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan		65.393.183.832,00	-	-	65.393.183.832,00
6	Piutang Retribusi Jasa Umum		763.902.368,00	-	-	763.902.368,00
7	Piutang Retibusi Jasa Usaha		82.990.885,00	-	-	82.990.885,00
8	Piutang Retibusi Perizinan Tertentu		1.408.379.000,00	-	-	1.408.379.000,00
9	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	-	-	-
10	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		39.144.322,76	-	-	39.144.322,76
11	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		-	-	-	-
12	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		13.607.251.004,99	-	-	13.607.251.004,99
13	Piutang Jasa Kesehatan		-	-	-	-
14	Piutang Jasa Pihak Ketiga		-	-	-	-
JUMLAH			85.244.634.672,24	-	-	85.244.634.672,24

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
 NOMOR : 11 TAHUN 2022
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN / LEMBAGA / PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISETORKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN INI	JUMLAH MODAL (INVESTASI) YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG AKAN DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1970 / 1971	BPD BALI	Perda No. 4 Tahun 2016	Investasi	31.006.000.000,00	31.006.000.000,00	0,00	31.006.000.000,00	0,00	8.792.447.000,00	0,00	0,00
2	2003	DHARMA SANTHIKA	Perda No. 19 Tahun 2016	Investasi	12.895.684.468,00	6.895.684.468,00	0,00	6.895.684.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2004	PDAM	Perda No. 16 Tahun 2014	Modal Perusahaan	50.054.869.544,86	50.054.869.544,86	0,00	50.054.869.544,86	0,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00
4	2011	JAMKRIDA	Perda No. 18 Tahun 2017	Investasi	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	1.300.000.000,00	0,00	6.488.000,00	0,00	0,00
JUMLAH					95.256.554.012,86	89.256.554.012,86	0,00	89.256.554.012,86	0,00	10.198.935.000,00	0,00	0,00

BIJAKTI TABANAN.

I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN XIII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 11 TAHUN 2022

TANGGAL : 22 DESEMBER 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA ASET	JENIS ASET	SALDO PADA AKHIR TAHUN 2021	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2022	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2022	PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6	7 = 5+5-6
1	TANAH		528.016.453.630,42	0,00	0,00	528.016.453.630,42
2	PERALATAN DAN MESIN		551.184.425.189,28	0,00	0,00	551.184.425.189,28
3	GEDUNG DAN BANGUNAN		922.091.283.852,33	0,00	0,00	922.091.283.852,33
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		1.725.574.023.066,79	0,00	0,00	1.725.574.023.066,79
5	ASET TETAP LAINNYA		13.177.063.778,50	0,00	0,00	13.177.063.778,50
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN		19.173.982.734,70	0,00	0,00	19.173.982.734,70
	JUMLAH		3.759.217.232.252,02	0,00	0,00	3.759.217.232.252,02

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA



LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 11 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 DESEMBER 2022

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTY YEARS)
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 11 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 DESEMBER 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN XVI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 11 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 DESEMBER 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	SUMBER PINJAMAN DAERAH	DASAR HUKUM PINJAMAN / OBLIGASI	TANGGAL/TAHUN PERJANJIAN PINJAMAN OBLIGASI	JUMLAH PERJANJIAN / NILAI NOMINAL OBLIGASI-OBLIGASI (Rp)	JANGKA WAKTU PINJAMAN	PROSENTASE BUNGA PINJAMAN %	TAHUN PENGGUNAAN PINJAMAN	JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN INI (Rp)		JUMLAH SISA PEMBAYARAN (Rp)	
								POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA	POKOK PINJAMAN DAERAH	BUNGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PT.Sarana Multi Infrastruktur	PERJ-097/SMI/0721	26 Juli 2021	125.000.000.000	8 Tahun	6,19%	2021	19.230.769.231	7.191.907.051	105.769.230.769	-
JUMLAH				125.000.000.000				19.230.769.231	7.191.907.051	105.769.230.769	-

BUPATI TABANAN,

IKOMANG GEDE SANJAYA